



MINISTRY OF TRADE
REPUBLIC OF INDONESIA



RENCANA KERJA BAPPEBTI 2026



**BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN
BERJANGKA KOMODITI**



MINISTRY OF TRADE
REPUBLIC OF INDONESIA



www.bappebti.go.id



[@bappebti](https://www.instagram.com/bappebti)



[Bappebti Kementerian Perdagangan](https://www.facebook.com/Bappebti.Kementerian.Perdagangan)



[infobappebti](https://twitter.com/infobappebti)

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga Rencana Kerja Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Tahun Anggaran 2026 dapat selesai disusun. Dokumen Rencana Kerja Bappebti ini disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan Program Kerja yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026 sehingga dapat dinilai dan diukur hasilnya.

Mengingat pentingnya Rencana Kerja tersebut sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud maka dipandang perlu untuk membuat target-target pengukuran kerja secara kuantitatif dan kualitatif agar memudahkan untuk melakukan evaluasi kinerja Bappebti Tahun 2026. Dokumen Rencana Kerja ini disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Rencana Kerja ini didasarkan pada mandat dan wewenang Bappebti yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan perubahannya, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang dan perubahannya, Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2022 tentang Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas, serta mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kementerian Perdagangan.

Akhir kata, tidak lupa kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam proses penyusunan sehingga RENJA Bappebti Tahun Anggaran 2026 ini, sehingga dapat selesai tepat pada waktunya.

Jakarta, Desember 2025

KEPALA BAPPEBTI,

TIRTA KARMA SENJAYA

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi	4
C. Ruang Lingkup	6
BAB II CAPAIAN KINERJA	7
A. Capaian Kinerja Tahun 2024	7
B. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2024	10
BAB III RENCANA KERJA	11
A. Visi, Misi, dan Tujuan	11
B. Program dan Kegiatan	12
C. Indikator Sasaran Strategis, Program, Kegiatan, dan Output	13
BAB IV PENUTUP	21
LAMPIRAN	
Form Rencana Kerja	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang komoditi memiliki peranan dalam melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri

Dalam rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029, visi RPJMN mengikuti Visi Presiden dan Wakil Presiden periode 2025-2029, yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Pencapaian visi tersebut dilaksanakan melalui (delapan) Misi Asta Cita, 17 (tujuh belas) Program Prioritas, 8 (delapan) Program Hasil Terbaik Cepat, dan didukung oleh 320 (tiga ratus dua puluh) Program Kerja Nasional dengan tetap berpedoman pada RPJPN 2025-2045 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir.

Asta Cita sebagai 8 (delapan) Misi Presiden dituangkan dalam Prioritas Nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, antara lain:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Perwujudan **Asta Cita** tersebut, turut didukung Kementerian Perdagangan, khususnya pada **Prioritas Nasional/ Asta Cita ke-2 “Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru”** dan **ke-5 “Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri”**.

Untuk mendukung Asta Cita tersebut, Kementerian Perdagangan menetapkan visi, misi dan tujuan strategis yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang.

Visi Kementerian Perdagangan periode 2025-2029 adalah “Perdagangan yang Ekspansif dan Terintegrasi Dengan Rantai Pasar Domestik dan Global Dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Emas 2045” yang diwujudkan melalui misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kinerja perdagangan domestik yang terintegrasi dan berkelanjutan pada periode 2025-2029;
2. Meningkatkan kinerja ekspor barang dan jasa yang bernilai tambah dan berkelanjutan pada periode 2025-2029; dan
3. Memperkuat kapasitas kelembagaan urusan perdagangan yang efektif dan efisien pada periode 2025-2029.

Kementerian Perdagangan telah menetapkan 3 (tiga) tujuan untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, yaitu :

1. **Meningkatnya keamanan dan ketahanan pasar dalam negeri** dengan 2 (dua) sasaran strategis yang ingin dicapai adalah:
 - 1.1. Meningkatkan nilai perdagangan domestik (SS1); dan
 - 1.2. Meningkatkan perlindungan konsumen (SS2).
2. **Meningkatnya nilai dan kualitas ekspor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi**, dengan 1 (satu) sasaran strategis yang ingin dicapai adalah:
 - 2.1. Meningkatkan perluasan akses pasar ekspor barang dan jasa (SS3)

3. Meningkatkan kinerja Kementerian Perdagangan yang produktif dan inovatif, dengan 2 (dua) sasaran strategis yang ingin dicapai adalah:

- 3.1. Meningkatkan kualitas tata kelola organisasi yang akuntabel dan adaptif (SS4); dan
- 3.2. Meningkatkan kapabilitas SDM Perdagangan (SS5).

Dari 3 (tiga) tujuan strategis Kementerian Perdagangan, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) memiliki peran untuk mendukung tujuan ke-1 yaitu meningkatkan keamanan dan ketahanan pasar, khususnya pada sasaran strategis 1 (SS1) yaitu : **“meningkatkan nilai perdagangan domestik”** melalui upaya-upaya sebagai berikut :

1. **Meningkatkan nilai tambah Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang komoditi (PLK) dalam mendukung peningkatan keamanan dan ketahanan pasar dalam negeri** melalui pertumbuhan volume dan nilai transaksi, pendalaman PBK, SRG, dan PLK dalam menciptakan stabilitas harga, melindungi nilai ekonomi komoditas strategis, serta membangun rantai pasok yang tangguh dan efisien sehingga mampu menjadi penyangga yang proaktif dalam meredam gejolak dan kerentanan pasar, menjamin kelancaran arus distribusi komoditas dan memperkuat daya saing pelaku usaha domestik.
2. **Meningkatkan kontribusi PBK, SRG, PLK terhadap perdagangan domestik yang** mencakup upaya untuk mengintegrasikan PBK, SRG, dan PLK ke dalam sistem perdagangan dalam negeri secara lebih efektif, sehingga mampu mendukung pembentukan harga yang transparan, memperluas akses pasar bagi pelaku usaha, meningkatkan efisiensi rantai pasok, serta memperkuat daya saing produk komoditas nasional.
3. **Meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang transparan, akuntabel dan bersih di lingkungan Bappebti**, melalui transformasi sistem manajemen internal yang mengedepankan asas keterbukaan informasi (transparan), dapat dipertanggungjawabkan secara prosedural dan substantif (akuntabel), serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme

(bersih) sehingga tata kelola pemerintahan yang diwujudkan akan memperkuat kapasitas kelembagaan Bappebti dalam mengawal sektor PBK, SRG, dan PLK secara lebih legitim dan berintegritas.

Upaya-upaya tersebut dituangkan dalam Rencana Strategis Bappebti dalam bentuk arah kebijakan, strategi dan program yang dapat menjawab isu-isu strategis 5 tahun ke depan yang tetap sejalan dengan amanat peraturan perundang - undangan bidang PBK, SRG dan PLK.

Melalui Rencana Kerja tahun 2026 ini, Bappebti sebagai salah satu Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Perdagangan akan menjabarkan seluruh program dan kegiatan sesuai arah kebijakan yang termuat dalam Rencana Strategis Bappebti Tahun 2025-2029.

Rencana Kerja ini merupakan landasan untuk peningkatan pembangunan di sektor perdagangan, khususnya di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditi.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Bappebti melaksanakan tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan, pembinaan, dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan, pembinaan, dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi menyelenggarakan fungsi yaitu:

- a. perumusan kebijakan di bidang pengembangan, pembinaan, dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan dan pembinaan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas;
- c. pelaksanaan pengawasan preventif di bidang perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas;
- d. pelaksanaan pengawasan represif dalam hal pemeriksaan,

- penyidikan dan pengenaan sanksi di bidang perdagangan berjangka komoditi dan sistem resi gudang;
- e. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas;
 - f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas;
 - g. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan, pembinaan, dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas;
 - h. pelaksanaan administrasi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Penyelenggaraan fungsi Bappebti dilaksanakan oleh 5 (lima) Unit Eselon II yang dipimpin oleh Kepala Bappebti.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan, Fungsi Bappebti dilaksanakan oleh 5 (lima) unit eselon II, yaitu:

1. Sekretariat, yang terdiri dari:
 - a. Bagian Program dan Kerja Sama;
 - b. Bagian Umum; dan
 - c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
2. Biro Perundang-undangan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas, terdiri dari :
 - a. Subbagian Tata Usaha; dan
 - b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
3. Biro Pengawasan dan Penindakan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas, yang terdiri dari :
 - a. Subbagian Tata Usaha; dan
 - b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
4. Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi, yang terdiri dari :
 - a. Subbagian Tata Usaha; dan
 - b. Kelompok jabatan fungsional.
5. Biro Pembinaan dan Pengembangan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas, yang terdiri dari :
 - a. Subbagian Tata Usaha; dan
 - b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana

Bagian Program dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, kerja sama, manajemen risiko, kepatuhan internal, serta penyusunan evaluasi dan laporan di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Bagian Program dan Kerja Sama terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan sumber daya manusia, organisasi, tata laksana, reformasi birokrasi, perlengkapan, barang milik/kekayaan negara, rumah tangga, tata usaha, tata persuratan, dan kearsipan di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Bagian Umum terdiri atas: a.) Subbagian Barang Milik Negara dan Rumah Tangga; dan b) jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Subbagian Barang Milik Negara dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan barang milik/kekayaan negara, penyimpanan dan pendistribusian perlengkapan, tata usaha, rumah tangga, tata persuratan, dan kearsipan di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

Sedangkan Subbagian Tata Usaha yang ada di setiap Biro mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan Biro.

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappebti TA. 2026	Ruang lingkup penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappebti TA. 2026 meliputi: Bab I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, tugas pokok dan fungsi, serta ruang lingkup Bab II Capaian Kinerja Bappebti Tahun 2024 Bab III Rencana Kerja meliputi : Visi dan Misi, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Bab IV Penutup
---	---

BAB II

CAPAIAN KINERJA

A. Capaian Kinerja Tahun 2024

Capaian Kinerja Bappebti 2024

Kinerja Bappebti dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappebti berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2025 yaitu menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan, pembinaan dan pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang Komoditas (PLK). Pelaksanaan kinerja tersebut diukur capaiannya berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Bappebti. Berdasarkan hasil pengukuran/penilaian kinerja, diperoleh capaian indikator kinerja program tahun 2024 sebagai tabel berikut.

Tabel 2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program		Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatkan Implementasi Pemanfaatan PBK, SRG, dan PLK	Pertumbuhan Perdagangan Komoditi	Implementasi Berjangka	14%	16.57%	118.34
		Pertumbuhan Sistem Resi Gudang	Implementasi	20%	23.40%	117.02
		Pertumbuhan Pasar Lelang Komoditas	Implementasi	25%	28.51%	114.05
		Persentase Perdagangan Aset Kripto	Pengembangan	59%	53.00%	90.00
2	Meningkatnya Perlindungan Kepada Masyarakat dalam Pelaksanaan PBK, SRG, dan PLK	Indeks Kepuasan Layanan Publik		85	88.28	103.86
		Kepatuhan Pedagang Berjangka Komoditi	Pelaku Usaha	95%	100.62%	105.91
		Pemenuhan Konsultasi dan litigasi	Hukum	85%	88.07%	103.61
		Persentase Kepatuhan Usaha Aset Kripto	Pelaku	95%	96.13%	101.19
Rata-Rata						106.75

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Bappebti TA. 2024

Berdasarkan tabel di atas, rata-rata persentase capaian sasaran program Bappebti pada tahun 2024 adalah sebesar 106,75%. Pada tahun 2024, rata-rata indikator kinerja program Bappebti mencapai lebih

dari 100%. Hal tersebut karena koordinasi dan kolaborasi antara unit Bappebti berjalan dengan baik. Namun pada tahun 2024, terdapat indikator kinerja yang tidak tercapai yakni Persentase Pertumbuhan Pengembangan Perdagangan Aset Kripto (capaian 90%). Tidak tercapainya indikator tersebut karena Analisis Hirarki Proses (AHP) untuk penetapan Aset Kripto yang layak diperdagangkan belum selesai dilakukan hingga akhir tahun 2024, selain itu hal tersebut juga dipengaruhi faktor global seperti kondisi pasar dan pergerakan harga Aset Kripto.

Kedepannya, indikator Persentase Pengembangan Perdagangan Aset Kripto dan Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Aset Kripto tidak perlu menjadi indikator kinerja bappebti lagi karena kewenangan pengaturan dan pengawasan aset keuangan digital termasuk aset kripto telah beralih ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan adanya implementasi Undang-Undang Nomor Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Pada tahun 2024, capaian kinerja Bappebti dapat dijelaskan secara lebih detail sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Implementasi PBK tahun 2024 mencapai pertumbuhan tertinggi dalam 5 tahun terakhir (16,57%). Pencapaian tersebut sebagian besar disebabkan karena meningkatnya hasil analisis pengembangan kelembagaan dan produk di bidang PBK dan kenaikan volume transaksi. Pelaksanaan kegiatan yang mendukung capaian ini antara lain : Optimalisasi Implementasi Bursa CPO Indonesia, Pelaksanaan analisis pengembangan kelembagaan dan produk Perdagangan Berjangka, Perizinan PBK, Literasi PBK, Penyusunan Regulasi, Penegakan Hukum dan Pemberian layanan konsultasi hukum bidang PBK.
2. Pertumbuhan Implementasi SRG mencapai 117,02% yang disebabkan karena adanya kenaikan jumlah Gudang yang mengimplementasikan SRG. Pelaksanaan kegiatan yang mendukung capaian ini antara lain : Pertemuan Teknis Sistem Resi Gudang dan Pemangku Kepentingan, Asistensi Implementasi SRG, Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas SRG, Pemantauan Pelaksanaan Pembiayaan Skema Subsidi Resi Gudang (SSRG), Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas SRG

3. Pertumbuhan Implementasi PLK tercapai sebesar 28,51% yang didukung dengan kenaikan jumlah pengguna dan penyelenggara PLK serta jumlah penyelenggaraan PLK. Dalam hal ini, kenaikan jumlah pengguna PLK memberikan kontribusi terbesar dalam pencapaian indikator. Pelaksanaan kegiatan yang mendukung capaian ini antara lain : Pertemuan Teknis Penyelenggara dengan Pelaku Usaha PLK, asistensi dan evaluasi Penggunaan SPLT kepada Penyelenggara PasarLelang Komoditas dan Pelaku Usaha.
4. Persentase Pengembangan Perdagangan Aset Kripto pada 2024 tercapai sebesar 53.00% yang didukung dengan Pertumbuhan pelanggan aset kripto dan jenis aset kripto yang dapat diperdagangkan. Pelaksanaan kegiatan yang mendukung capaian ini antara lain : Evaluasi dan Assesment terhadap Aset Kripto yang diperdagangkan.
5. Indeks kepuasan layanan publik Bappebti tercapai 88,28 yang diperoleh dari survei kepada para stakeholder PBK, SRG, dan PLK. Untuk memaksimalkan capaian indikator tersebut, dilakukan beberapa hal seperti: Penguatan informasi publik melalui optimalisasi media sosial Bappebti dan mengoptimalkan LINI (Layanan Informasi) Bappebti.
6. Kepatuhan Pelaku Usaha PBK, SRG dan PLK pada 2024 tercapai sebesar 100,62%. Capaian ini Sebagian besar disebabkan karena pelaku usaha menindaklanjuti perbaikan atas sanksi yang dikenakan serta patuh dalam pelaksanaan transaksi dan pelaporan keuangan dan operasional. Pelaksanaan kegiatan yang mendukung capaian ini antara lain : Pengawasan Kepatuhan Transaksi Pelaku Usaha PBK, pengawasan Kegiatan Pelaku Usaha, dan pengawasan kepatuhan Pelaporan dan Verifikasi Laporan Keuangan Pelaku Usaha PBK.
7. Pemenuhan KonsultasiHukum dan Litigasi pada 2024 tercapai sebesar 88,07%, capaian ini dipengaruhi oleh jumlah pemenuhan konsultasi hukum dan jumlah pemenuhan litigasi dan penanganan perselisihan. Pelaksanaan kegiatan yang mendukung capaian ini antara lain : Konsultasi Hukum tentang Peraturan dan Berperkara di Badan Peradilan dan/atau Penyelesaian Perselisihan di Bidang PBK, SRG dan PLK.

8. Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Aset Kripto tercapai sebesar 96,13%. Tercapainya indikator tersebut karena pelaku usaha Aset Kripto patuh terhadap peraturan yang berlaku baik dari sisi pelaporan laporan keuangan, transaksi dan menyampaikan laporan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan yang mendukung capaian ini antara lain :Pengawasan Transaksi Pelaku Usaha Aset Kripto dan Pengawasan Laporan Keuangan Pelaku Usaha Aset Kripto.

B. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2024

Akuntabilitas Keuangan Bappebti 2024

Pagu Anggaran BAPPEBTI Tahun 2024 adalah sebesar Rp60.592.610.000, namun setelah dilakukan beberapa kali revisi, termasuk pergeseran belanja gaji ke Sekretariat Jenderal Kemendag maka pagu akhir Bappebti menjadi Rp 30.966.528.000. Dari pagu akhir tersebut, yang dapat digunakan (tidak terblokir) adalah sebesar Rp26.389.893.000.

Berikut disampaikan realisasi dan capaian penggunaan anggaran BAPPEBTI berdasarkan Kegiatan:

Tabel 2.2
Realisasi Anggaran BAPPEBTI Berdasarkan Kegiatan
Periode Tahun 2024

No	Kegiatan	2024			
		Pagu Awal (Ribuan Rp)	Pagu Non- Blokir (Ribuan Rp)	Realisasi (Ribuan Rp)	%
1	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Bappebti	45.431.835	14.135.816	13.997.738	98,02
2	Pengawasan PBK, SRG dan PLK	3.377.000	2.741.724	2.704.111	98,63
3	Pembinaan dan Pengembangan SRG & PLK	6.092.000	4.861.927	4.854.498	99,84
4	Peningkatan Pelayanan Hukum	2.472.775	2.013.235	1.995.509	99,12
5	Pembinaan dan Pengembangan PBK	3.219.000	2.637.191	2.602.704	98,64
TOTAL		60.592.610	26.389.893	25.130.575	99,11

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Bappebti TA. 2024

Berdasarkan tabel di atas bahwa rata-rata Capaian Kinerja Anggaran pada tahun 2024 tercapai sebesar 99,11% dari pagu anggaran (revisi).

BAB III

RENCANA KERJA

A. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi Rumusan visi Bappebti merupakan penurunan dari visi Kementerian Perdagangan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Bappebti. Maka visi Bappebti periode 2025-2029 yakni:

“Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, Dan Pasar Lelang Komoditas Yang Maju Dan Berkelanjutan Dalam Rangka Mewujudkan Perdagangan Yang Ekspansif Dan Terintegrasi Dengan Rantai Pasar Domestik Dan Global”

Misi Guna mendukung operasionalisasi visi ke dalam bentuk peran, fungsi, dan program kerja yang nyata dan terukur, serta menjawab berbagai tantangan dan peluang dalam pengembangan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas maka Bappebti menyusun Misi Bappebti yang sesuai dengan tugas dan fungsi Bappebti, yakni menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan, pembinaan dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas, yaitu :

1. **Meningkatkan kinerja PBK, SRG, PLK yang tangguh dan berkelanjutan pada periode 2025-2029.**

Misi ini merupakan komitmen strategis untuk membangun fondasi ekosistem PBK, SRG, dan PLK yang lebih maju dan andal melalui penguatan regulasi, peningkatan kapasitas pelaku pasar, dan optimalisasi teknologi, sehingga tidak hanya mampu menghadapi volatilitas pasar global tetapi juga tetap konsisten dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang transparan, akuntabel dan bersih

2. **Menguatkan kapasitas kelembagaan Bappebti yang efektif dan efisien. pada periode 2025-2029.**

Misi ini untuk memperkuat fondasi kelembagaan agar mampu menjalankan tugas pengaturan, pengawasan, dan pengembangan pasar komoditas secara optimal melalui perbaikan sistem perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja yang terukur,

optimalisasi sumber daya dan sinergi antarunit kerja maupun dengan pemangku kepentingan eksternal

Tujuan

Tujuan strategis Bappebti dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang berdasarkan hasil identifikasi potensi, permasalahan, dan tantangan yang akan dihadapi, yaitu:

- 1) T.0 Terwujudnya nilai tambah PBK, SRG dan PLK dalam mendukung peningkatan keamanan dan ketahanan pasar dalam negeri
- 2) T.1 Terwujudnya peningkatan kontribusi PBK, SRG, PLK terhadap perdagangan domestik
- 3) T.2 Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang transparan, akuntabel dan bersih di lingkungan Bappebti

B. Program dan Kegiatan**Program**

Dalam mendukung arah kebijakan dan strategi Kementerian Perdagangan maka Bappebti dalam pelaksanaannya masuk dalam 2 (dua) program yaitu **Perdagangan Dalam Negeri dan Dukungan Manajemen.**

1. Kegiatan Perdagangan Dalam Negeri diterapkan pada empat kegiatan

Untuk mengimplementasikan arah kebijakan dan strategi 2025-2029 tersebut, maka Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi melaksanakan program yaitu Perdagangan Dalam Negeri yang diterapkan dalam 4 (empat) kegiatan, yaitu:

1. Pengawasan dan Penindakan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas.
2. Pembinaan dan Pengembangan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas.
3. Peningkatan efektifitas kebijakan dan pelayanan hukum.
4. Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi.

2 Dukungan Manajemen diterapkan pada satu kegiatan

Dalam mendukung program yang diterapkan dalam kegiatan, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi melaksanakan program Dukungan Manajemen yang penerapannya dalam kegiatan “Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi”.

C. Indikator Sasaran Strategis, Program, Kegiatan dan Output

Sasaran Strategis Merujuk kepada Rencana Strategis Kementerian Perdagangan RI pada Permendag Nomor 34 Tahun 2025, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi mendukung pencapaian Sasaran Strategis Kementerian Perdagangan 2025-2029 yaitu **“Meningkatnya Nilai Perdagangan Domestik”**. Adapun Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang diampu Bappebti sesuai tabel berikut :

Tabel 3.1
Indikator Kinerja Sasaran Strategis Bappebti
Berdasarkan Renstra Bappebti Tahun 2025-2029

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
Tujuan							
Meningkatnya Nilai Perdagangan Domestik	Pertumbuhan Transaksi PBK, SRG dan PLK	Persen (%)	17	17	17	17	17

Sumber: Renstra Bappebti 2025-2029

Sedangkan jika merujuk kepada aplikasi KRISNA RENJA 2026, Indikator Kinerja Sasaran Strategis Bappebti Tahun 2026 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.2
Indikator Kinerja Sasaran Strategis Bappebti 2025
Berdasarkan KRISNA

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026
Tujuan			
Meningkatnya Nilai Perdagangan Domestik	Pertumbuhan Transaksi PBK, SRG dan PLK	Persen (%)	17

Sumber: KRISNA Rencana Kerja Bappebti 2026

Sasaran Program Dalam rangka mencapai mencapai sasaran strategis Bappebti 2025-2029, Bappebti menetapkan 2 (dua) sasaran program dan indikator sasaran program di lingkungan Bappebti. Indikator sasaran program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program. Indikator Sasaran Program Bappebti yaitu:

Tabel 3.3
Indikator Kinerja Sasaran Program Bappebti
Berdasarkan KRISNA Renja Tahun 2026

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026
Program	Perdagangan Dalam Negeri		
Meningkatnya Kinerja Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas yang tangguh dan berkelanjutan	Pertumbuhan Pelaku yang bertransaksi di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi dan Pasar Lelang Komoditas	Persen (%)	4
	Pertumbuhan Gudang yang mengimplementasikan Sistem Resi Gudang	Persen (%)	6
	Tingkat Kepatuhan dan Penegakan Hukum Pelaku Usaha Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas	Persen (%)	80
	Indeks Kepuasan Layanan Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas	Nilai	82
Program	Dukungan Manajemen		
Meningkatnya Birokrasi yang Transparan, Akuntabel, dan Bersih	Nilai SAKIP Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi	Nilai	82.5
	Indeks Penilaian Integritas Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi	Nilai	74.5

Sumber: KRISNA Rencana Kerja Bappebti 2026

Sasaran Kegiatan Untuk mencapai sasaran kinerja Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi maka telah ditetapkan dan direncanakan Indikator kinerja kegiatan Bappebti sebagaimana tabel dan rincian berikut ini:

Tabel 3.4
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Bappebti
Berdasarkan KRISNA Renja Tahun 2026

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026
Program	Perdagangan Dalam Negeri		
Meningkatnya Efektifitas pengawasan dan penindakan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas	Pelaku Usaha yang patuh dalam kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas	Persen (%)	83
	Persentase Penanganan Pelanggaran Ketentuan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas	Persen (%)	77
Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas	Pertumbuhan Pengelola Gudang Sistem Resi Gudang	Persen (%)	5
	Pertumbuhan pelaku Pasar Lelang Komoditas	Persen (%)	5
	Persentase jumlah peserta Bimtek di bidang Sistem Resi Gudang dan Pasar	Persen (%)	90

	Lelang Komoditas yang meningkat pemahamannya		
	Indeks kepuasan layanan perizinan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas	Nilai	86
	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan kelembagaan dan produk Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas yang ditindaklanjuti	Persen (%)	75
Meningkatnya Efektifitas Kebijakan dan pelayanan hukum di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas	Indeks Kualitas Kebijakan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas	Nilai	64
	Penyelesaian Perselisihan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi yang sesuai dengan SLA	Persen (%)	91
	Indeks kepuasan layanan Penyelesaian Perselisihan dan Konsultasi Hukum	Nilai	83
Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Kelembagaan dan Produk Perdagangan Berjangka Komoditi yang ditindaklanjuti	Nilai	75
	Pertumbuhan Pengguna Layanan Informasi Perdagangan Berjangka Komoditi	Persen (%)	11
	Pertumbuhan Pelaku Perdagangan Berjangka Komoditi	Persen (%)	3
	Indeks Kepuasan Layanan Perizinan Perdagangan Berjangka Komoditi	Nilai	82
	Persentase Jumlah Peserta Bimtek di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi yang meningkat pemahamannya	Persen (%)	82
Program	Dukungan Manajemen		
Meningkatnya kualitas tata Kelola Pemerintahan yang baik di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi	Predikat Penilaian Tertib Administrasi Bappebti	Predikat	WTA Madya
	Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA) Bappebti	Nilai	92
	Survey Kepuasan Masyarakat di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas	Nilai	79

Sumber: KRISNA Rencana Kerja Bappebti 2026

- 1 Meningkatnya Efektifitas pengawasan dan penindakan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang**
- Peningkatan Efektifitas pengawasan dan penindakan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang diampu oleh Biro Pengawasan dan Penindakan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas. Penjelasan lebih rinci tentang kegiatan ini terdapat dalam lampiran dan Rencana Kerja Biro Pengawasan dan Penindakan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas Tahun 2026. Indikator kegiatan dan rincian output yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan ini dijelaskan sebagai

Komoditas

berikut :

a) Pelaku Usaha yang patuh dalam kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas (Target : 83%)

Indikator Kegiatan ini didukung dengan beberapa rincian output antara lain :

- Pengawasan Pelaku Usaha PBK melalui Audit yang akan dilaksanakan pada 26 badan usaha bidang PBK
- *Pengawasan Pelaku Usaha SRG* yang akan dilaksanakan pada 5 badan usaha bidang SRG

b) Persentase Penanganan Pelanggaran Ketentuan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas (Target : 77%)

Indikator Kegiatan ini didukung dengan rincian output Pengawasan Pelaku Usaha legal/illegal melalui penindakan di Bidang PBK/SRG/PLK yang akan dilaksanakan pada 4 badan usaha.

2. Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas

Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas diampu oleh Biro Pembinaan dan Pengembangan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas. Penjelasan lebih rinci terdapat dalam **lampiran** dan Rencana Kerja Biro Pembinaan dan Pengembangan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas Tahun 2026. Indikator kegiatan dan rincian output yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan ini dijelaskan sebagai berikut :

a) Pertumbuhan Pengelola Gudang Sistem Resi Gudang (Target : 5%)

Indikator Kegiatan ini didukung dengan beberapa rincian output antara lain :

- Rancangan NSPK berupa Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Pengelola Gudang SRG dengan target 1 NSPK
- Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Penyalur Skema Subsidi Resi Gudang dengan target 2 lembaga.
- Data dan Informasi Harga Komoditi di Bidang SRG dan PLK dengan target 1 Dokumen

- Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan di bidang SRG dengan target 1 Kegiatan.
- Fasilitasi dan pembinaan calon pengelola Gudang SRG dengan target 1 lembaga
- Pembinaan/pendampingan pengelola gudang SRG dalam mengimplementasikan Warehouse Management System (WMS) dengan target 1 lembaga
- Sistem Aplikasi Warehouse Management System (WMS) dengan target 1 Sistem Informasi

b) Pertumbuhan pelaku Pasar Lelang Komoditas (Target : 5%)

Indikator Kegiatan ini didukung dengan beberapa rincian output antara lain :

- Sistem Aplikasi SPLT (Sistem Pasar lelang Terpadu) dengan target 1 Sistem Informasi
- Pembinaan / Pendampingan pada kegiatan Asistensi pelaku usaha PLK dengan target sebanyak 15 orang

c) Persentase jumlah peserta Bimtek di bidang Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas yang meningkat pemahamannya (Target : 90%)

Indikator Kegiatan ini didukung dengan beberapa rincian output antara lain :

- Fasilitasi dan Pembinaan dalam rangka Peningkatan Kompetensi Pengelola Gudang SRG (Target : 1 Lembaga);
- Pembinaan / Pendampingan pada pertemuan teknis pelaku usaha PLK (15 orang)
- Fasilitasi dan Pembinaan pelaku usaha dan petani di bidang SRG (75 orang)

d) Indeks kepuasan layanan perizinan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas (Target : Nilai 86)

Indikator Kegiatan ini didukung dengan beberapa rincian output antara lain :

- Perizinan Lembaga SRG dengan target 2 lembaga
- Perizinan Lembaga PLK dengan target 1 lembaga
- Sistem Informasi Persetujuan SRG dan PLK dengan target 1 dokumen

e) **Rekomendasi Kebijakan Pengembangan kelembagaan dan produk Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas yang ditindaklanjuti (Target : 75%)**

Indikator Kegiatan ini didukung dengan beberapa rincian output antara lain : Rekomendasi Kebijakan terhadap Dampak Kebijakan Pengembangan Kelembagaan dan Komoditi SRG/PLK yang ditargetkan sebanyak 1 Rekomendasi Kebijakan

3. Meningkatnya Efektifitas Kebijakan dan pelayanan hukum di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi , Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas

Peningkatan Efektifitas Kebijakan dan pelayanan hukum di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi , Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas diampu oleh Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan. Penjelasan lebih rinci terdapat dalam **lampiran** dan Rencana Kerja Biro Perundang-Undangan Tahun 2026. Indikator kegiatan dan rincian output yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan ini dijelaskan sebagai berikut :

1) Indeks Kualitas Kebijakan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas (Target : 64)

Indikator Kegiatan ini didukung dengan beberapa rincian output antara lain :

- Peraturan Bappebti di bidang PBK (Target : 2 Peraturan)
- Peraturan Bappebti di bidang SRG dan PLK (Target : 1 Peraturan)

2) Penyelesaian Perselisihan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi yang sesuai dengan SLA (Target : 91%)

Indikator Kegiatan ini didukung dengan rincian output: Layanan penanganan perkara di badan peradilan/atau alternatif penyelesaian perselisihan di bidang PBK,SRG dan PLK (5 Perkara)

3) Indeks kepuasan layanan Penyelesaian Perselisihan dan Konsultasi Hukum (Target : 83)

Indikator Kegiatan ini didukung dengan rincian output: Layanan Asistensi hukum di bidang PBK, SRG dan PLK (6 orang)

4. Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka

Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi diampu oleh Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi. Penjelasan lebih rinci terdapat dalam **lampiran** dan Rencana Kerja Biro Pembinaan dan

Komoditi

Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi Tahun 2026. Indikator kegiatan dan rincian output yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan ini dijelaskan sebagai berikut :

1) Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Kelembagaan dan Produk Perdagangan Berjangka Komoditi yang ditindaklanjuti (Target : 75)

Indikator Kegiatan ini didukung dengan rincian output: Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Kelembagaan dan Produk di bidang PBK (1 Rekomendasi)

2) Pertumbuhan Pengguna Layanan Informasi Perdagangan Berjangka Komoditi (Target : 11%)

Indikator Kegiatan ini didukung dengan rincian output: Data dan Informasi Harga Komoditi di Bidang PBK (1 Dokumen)

3) Pertumbuhan Pelaku Perdagangan Berjangka Komoditi (Target 3%)

Indikator Kegiatan ini didukung dengan beberapa rincian output antara lain :

- Perizinan Wakil Pialang Berjangka dan Wakil Penasehat Berjangka (500 orang)
- Layanan Sertifikasi Ujian Profesi Wakil Pialang Berjangka dan Wakil Penasihat Berjangka (200 orang)

4) Indeks Kepuasan Layanan Perizinan Perdagangan Berjangka Komoditi (Target : 82)

Indikator Kegiatan ini didukung dengan beberapa rincian output antara lain :

- Perizinan Pelaku Usaha Perdagangan Berjangka Komoditi (500 Badan Usaha)
- Sistem Aplikasi Perizinan PBK (1 Sistem Informasi)

5) Persentase Jumlah Peserta Bimtek di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi yang meningkat pemahamannya (Target : 82%)

Indikator Kegiatan ini didukung dengan rincian output: Fasilitasi dan pembinaan pelaku usaha Perdagangan Berjangka Komoditi

5. Meningkatnya

kualitas

tata

Peningkatan kualitas tata Kelola Pemerintahan yang baik di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi diampu oleh Sekretariat

Kelola Pemerintahan yang baik di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi	Bappebti. Penjelasan lebih rinci terdapat dalam lampiran dan Rencana Kerja Sekretariat Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Tahun 2026. Indikator kegiatan dan rincian output yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan ini dijelaskan sebagai berikut : 1) Predikat Penilaian Tertib Administrasi Bappebti (Target : Predikat WTA Madya) <i>Indikator Kegiatan ini didukung dengan beberapa rincian output antara lain :</i> - Peralatan Teknologi Informasi dan komunikasi Penunjang Pelaksanaan Tugas Bappebti (Target : 1 Unit) - Layanan Perkantoran (Target 1 Layanan) - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal, khususnya pada 6 layanan yaitu: Perencanaan dan Penganggaran, Evaluasi dan Pelaporan, Pengelolaan Keuangan, Pengelolaan Ketatausahaan, Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), dan Pengelolaan Organisasi dan Kepegawaian Bappebti 2) Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA) Bappebti (Target : 92) Indikator Kegiatan ini didukung dengan beberapa komponen pada rincian output Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal yang juga mendukung indikator lainnya, khususnya pada 3 layanan yaitu: Perencanaan dan Penganggaran, Evaluasi dan Pelaporan serta Pengelolaan Keuangan. 3) Survey Kepuasan Masyarakat di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas (Target : 79) Indikator Kegiatan ini didukung dengan beberapa komponen pada rincian output <i>Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal yang juga mendukung indikator lainnya</i>, khususnya pada layanan Pengelolaan Informasi Publik dan Kehumasan.
--	---

BAB IV

PENUTUP

***Pencapaian
Indikator tahun
2026 diharapkan
dapat
terlaksananya
dengan baik***

Rencana Kerja ini diharapkan menjadi acuan bagi Bappebti dalam pelaksanaan kegiatannya untuk mencapai sasaran dan Indikator kinerja strategis, program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada tahun 2026, antara lain :

1. Peningkatan Efektifitas pengawasan dan penindakan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang;
2. Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas;
3. Peningkatan Efektifitas Kebijakan dan pelayanan hukum di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi , Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas;
4. Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi; serta
5. Peningkatan layanan dukungan teknis dan administratif Bappebti dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Pencapaian target tahun 2026 untuk masing-masing indikator diharapkan dapat terlaksananya dengan baik sehingga tugas dan fungsi Bappebti dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan, pembinaan dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas juga dapat berjalan optimal. Selain itu, diharapkan pencapaian target tersebut dapat meningkatkan penilaian kinerja Bappebti dibandingkan tahun sebelumnya.

LAMPIRAN 1A
FORMULIR
RENCANA KERJA
BAPPEBTI
TAHUN 2026

LAMPIRAN 1A
FORMULIR RENCANA KINERJA
BAPPEBTI TAHUN 2026

SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
Meningkatnya Kinerja Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas yang tangguh dan berkelanjutan	Pertumbuhan Gudang yang Mengimplementasikan Sistem Resi Gudang	Persen (%)	6
	Tingkat Kepatuhan dan Penegakan Hukum Pelaku Usaha Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas	Persen (%)	80
	Indeks Kepuasan Layanan Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas	Nilai	82
	Pertumbuhan Pelaku yang bertransaksi di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi dan Pasar Lelang Komoditas	Persen (%)	4
Meningkatnya birokrasi yang transparan,akuntabel dan bersih	Indeks Penilaian Integritas Bappebti	Nilai	74,5
	Nilai SAKIP Bappebti	Nilai	82,5

Mengetahui, Desember 2025
KEPALA BAPPEBTI


TIRTA KARMA SENJAYA

LAMPIRAN 2

FORMULIR APLIKASI KRISNA

BAPPENAS TAHUN 2026

REKAP 1A: K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2026

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERDAGANGAN
2. VISI : Kementerian Perdagangan yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.
3. MISI : 1. Meningkatkan Kinerja Perdagangan Luar Negeri
2. Meningkatkan Kinerja Perdagangan Dalam Negeri
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (good governance) di Sektor Perdagangan

4. PRIORITAS NASIONAL

KODE	PRIORITAS NASIONAL	ALOKASI 2026 (RIBU)
05	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	318.000,0
Total		318.000,0

5. SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L

KODE	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L	TARGET 2026	ALOKASI 2026 (RIBU)
01	Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non-Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa		91.190.018,0
01.01	Neraca Perdagangan Barang	31,6-53,4	
01.02	Pertumbuhan Ekspor Riil Barang dan Jasa	8,1	
01.03	Pertumbuhan Ekspor Non Migas	6,4	
01.04	Rasio Ekspor Jasa Terhadap PDB	2,1-2,3	
01.05	Jumlah Kesepakatan Perdagangan Internasional	34 (Kumulatif)	
02	Mewujudkan Stabilisasi Harga dan Ketersediaan Pasokan Bahan Pangan		0,0
02.01	Inflasi Pangan yang Bergejolak	3,1	
03	Mewujudkan Konsumen Berdaya Dan Pelaku Usaha Yang Bertanggung Jawab		21.443.067,0
03.01	Indeks Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	64	
04	Meningkatnya Pasar Produk Dalam Negeri		10.920.419,0

KODE	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L	TARGET 2026	ALOKASI 2026 (RIBU)
04.01	Pertumbuhan Sub-sektor Perdagangan Besar dan Eceran, bukan Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDB		
04.02	Kontribusi Produk Dalam Negeri terhadap Konsumsi Rumah Tangga Nasional		
05	Mengoptimalkan Peranan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang Komoditas (PLK)		2.100.000,0
05.01	Pertumbuhan Nilai Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK)	73	
05.02	Pertumbuhan Nilai Pembiayaan dari Sistem Resi Gudang	15	
05.03	Pertumbuhan Realisasi Nilai Transaksi Pasar Lelang Komoditas	7	
06	Meningkatnya Kinerja Kementerian Perdagangan Yang Bersih, Akuntabel dan Profesional		1.274.710.726,0
06.01	Indeks Reformasi Birokrasi	85	
06.02	Unit Kerja Kementerian Perdagangan yang mendapatkan predikat "WBK/WBBM"	4	
06.03	Indeks Penilaian Integritas	74	
06.04	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	
Total			1.400.364.230,0

6. PROGRAM DAN PENDANAAN

KODE	PROGRAM	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026											PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)		
		RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL	2027	2028	2029
090.EF	Program Perdagangan Dalam Negeri	2.010.000,0	90.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.100.000,0	0,0	0,0	0,0
090.WA	Program Dukungan Manajemen	5.939.077,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.939.077,0	0,0	0,0	0,0
Total		7.949.077,0	90.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8.039.077,0	0,0	0,0	0,0

Jakarta, Desember 2025

KEPALA BAPPEBTI,

TIRTA KARMA SENJAYA

REKAP 2: PROGRAM K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2026

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERDAGANGAN
2. SASARAN STRATEGIS K/L YANG DIDUKUNG :
 03 - Mewujudkan Konsumen Berdaya Dan Pelaku Usaha Yang Bertanggung Jawab
 04 - Meningkatnya Pasar Produk Dalam Negeri
 05 - Mengoptimalkan Peranan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang Komoditas (PLK)
3. PROGRAM : Program Perdagangan Dalam Negeri
4. PRIORITAS NASIONAL

KODE	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	ALOKASI 2026 (RIBU)
05	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	18.505.449,0
05.03	Optimalisasi Backbone Integrasi Ekonomi dan Perkuatan Sistem Logistik Nasional	286.000,0
05.05	Peningkatan Perdagangan Domestik, Antarwilayah, dan Ekspor serta Peningkatan Partisipasi dalam Rantai Nilai Global	18.219.449,0
08	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	66.100,0
08.02	Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan serta Penguatan Karakter Bangsa	66.100,0
Total		18.571.549,0

5. SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

KODE	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET 2026	ALOKASI 2026 (RIBU)
01	Meningkatnya Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik		2.065.108,0
01.01	Persentase Peningkatan Nilai Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik	8.5	
02	Meningkatnya Nilai Tambah Perdagangan Jasa		2.110.459,0
02.01	Persentase Peningkatan Nilai Tambah Perdagangan Jasa	5.5	
03	Meningkatnya Penetrasi Produk Dalam Negeri		1.587.004,0
03.01	Persentase Barang Dalam Negeri yang Diperdagangkan di Pasar Domestik	87	

KODE	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET 2026	ALOKASI 2026 (RIBU)
05	Meningkatnya Konsumen Berdaya dan Pelaku Usaha yang Bertanggungjawab		19.718.639,0
05.01	Indeks Keberdayaan Konsumen		
05.02	Indeks Tertib Ukur	49	
05.03	Indeks Tertib Mutu	39	
05.04	Indeks Kendali Mutu	74	
05.05	Indeks Tertib Niaga	62	
05.06	Indeks Literasi Konsumen	56,55	
06	Meningkatnya Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran		1.788.121,0
07	Meningkatnya Integrasi Perdagangan Domestik		286.000,0
07.01	Persentase pertumbuhan volume perdagangan barang kebutuhan pokok melalui perdagangan antar pulau dengan menggunakan manifest domestik	15	
08	Meningkatnya Hasil Pembinaan Usaha dan Pelaku Usaha Perdagangan		1.613.305,0
08.01	Persentase Pertumbuhan Pelaku Usaha Perdagangan Besar dan Eceran	5	
09	Meningkatnya Kinerja Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas yang tangguh dan berkelanjutan		2.100.000,0
09.01	Pertumbuhan Pelaku yang bertransaksi di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi dan Pasar Lelang Komoditas	4	
09.02	Pertumbuhan Gudang yang mengimplementasikan Sistem Resi Gudang	6	
09.03	Tingkat Kepatuhan dan Penegakan Hukum Pelaku Usaha Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas	80	
09.04	Indeks Kepuasan Layanan Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas	82	
10	Meningkatnya Kualitas Rekomendasi Kebijakan Perdagangan		0,0
11	Pengembangan Upaya Perlindungan Konsumen yang Efektif		1.724.428,0
12	Meningkatnya Ketahanan Pasar Dalam Negeri terhadap Lonjakan Impor, Barang Dumping, dan Barang Mengandung Subsidi		1.470.422,0
Total			34.463.486,0

6. OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM

KODE	OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM	ALOKASI 2026 (RIBU)
Total		0,0

7. KEGIATAN DAN PENDANAAN

KODE	PROGRAM	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026											PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)		
		RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL	2027	2028	2029
3759	Pengawasan dan Penindakan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas	525.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	525.000,0	0,0	0,0	0,0
3760	Pembinaan dan Pengembangan Sistem Resi Gudang Dan Pasar Lelang Komoditas	525.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	525.000,0	0,0	0,0	0,0
3761	Peningkatan Efektifitas Kebijakan dan Pelayanan Hukum	525.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	525.000,0	0,0	0,0	0,0
3762	Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi	435.000,0	90.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	525.000,0	0,0	0,0	0,0
Total		2.010.000,0	90.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.100.000,0	0,0	0,0	0,0

Jakarta, Desember 2025

KEPALA BAPPEBTI,

TIRTA KARMA SENJAYA